



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

KAMIS : 21 JANUARI 2021
EDISI : 00226287/GBP/II/2021

KLIPING

Berita Pertanian



GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

KAMIS, 21 JANUARI 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :

- Pemerintah Komit Stabilkan Harga Daging (MI)..... 1
- Rumah Pemotongan Hewan Pun Kosong (R) 2
- Pedagang Daging Mogok Tiga Hari (R) 3-4
- Harga Daging Tinggi, Izin Impor Menanti (SI) 5-6

2. PERKEBUNAN :

- Panen Terganggu Banjir (BI) 7
- BPDPKS Salurkan Rp. 5,32 Triliun Untuk Peremajaan Sawit Rakyat (ID) 8-9

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN ARTIKEL DAN OPINI :

- Ketika Jokowi Marah Di Rapat Soal Pertanian (RM) 10-11
- Ketika Jokowi Marah Soal Pupuk (RM) 12-13

000000000000000000000000 OOO 0000000000000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 0 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input checked="" type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Pemerintah Komit Stabilkan Harga Daging

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi dari persoalan harga daging sapi yang terus melonjak dalam beberapa pekan terakhir.

Istana sangat terbuka untuk menerima aspirasi para pelaku usaha peternakan, termasuk para pedagang daging sapi.

"Kalau mereka datang, pasti kami terima. Kami selalu menerima berbagai aspirasi dan yang paling penting kita akan carikan solusinya," ujar Moeldoko di Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, saat ini harga daging sapi di tingkat konsumen sudah melampaui Rp120 ribu per kilogram. Bahkan, di beberapa daerah, harga komoditas tersebut sudah menyentuh Rp130 ribu per kilogram.

Padahal, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk daging sapi adalah Rp120 ribu per kilogram.

Ketua Harian DPP Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi, mengungkapkan kenaikan harga daging sapi disebabkan importir sudah mendapatkan harga tinggi dari negara produsen. Kenaikan tersebut membuat pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek melakukan mogok jualan.

"Seperti dari Australia per

Juli 2020 sudah berada di posisi US\$3,6 per kg bobot hidup sapi bakalan. Kemudian harga per Januari-Februari 2021 kembali naik menjadi US\$43,9 per kg, belum biaya-biaya bongkar muat pelabuhan dan transportasi angkutan," kata Asnawi dalam keterangannya.

Asnawi mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang diwakili Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri segera memberikan pengumuman terkait kenaikan yang bersifat anomali bahwa harga jual daging sapi di tingkat pengecer atau pedagang daging Rp130.000/kg. "Ketetapan tersebut akan berlaku hingga 2 bulan lamanya atau menjelang Ramadan," ujarnya. *M. W.*

Di sisi lain, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan pemerintah harus mewaspadai fluktuasi harga pangan yang berlangsung sejak akhir tahun lalu. Problem kenaikan harga daging sebenarnya telah terjadi sejak akhir tahun. Namun, karena saat itu stok mencukupi, jadi tidak menimbulkan kelangkaan. (Iam/Hld/E-1)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 8 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Rumah Pemotongan Hewan Pun Kosong

Suasana rumah potong hewan (RPH) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang berlokasi di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, berbeda dari biasanya. Pada Rabu (20/1), kondisi RPH terlihat sepi. Hal ini merupakan imbas dari aksi mogok pedagang daging sapi di pasar seluruh Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan Kota Bekasi, M Subarkah, menjelaskan, tidak ada aktivitas RPH selama tiga hari. Dia mengatakan, sejak Selasa (19/1) malam WIB, tidak ada pedagang yang datang untuk melakukan kegiatan pemotongan sapi.

"Kita tidak ada kegiatan, kita sebetulnya sudah *standby* kita sampai [Rabu] pukul 01.00 WIB, di sini karena memang di sini pemotongan pada malam hari. Tapi, tidak ada kegiatan,"

jas Subarkah saat ditemui di kantornya, Rabu.

Menurut dia, dalam kondisi normal, RPH dapat memotong 18 ekor sapi per hari. Jumlah ini meningkat menjadi 20 ekor sapi pada akhir pekan. "Setelah itu tergantung permintaan dari pasar," ujarnya.

RPH menyediakan tempat, pelayanan kesehatan, dan mengontrol pelaksanaan pemotongan sapi. Setiap sapi yang dipotong dikenakan retribusi Rp 25 ribu per ekor. Subarkah menyebut, mogok massal pedagang tak terlalu berdampak kepada UPTD. Namun, kondisi itu menyulitkan tukang jagal yang terimbas karena tidak mendapat upah seperti biasanya, yang disewa pengusaha atau pemilik sapi.

"Pedagang bebas *ngambil* dari jagal mana saja, yang paling banyak di Cakung. Yang justru berdampak itu tukang jagal yang setiap hari *motong*

sapi dan pedagang," kata Subarkah.

Selain sebagai tempat pemotongan sapi, RPH juga menyediakan lahan untuk singgah sapi. Subarkah mengatakan, sapi-sapi yang hendak dipotong harus diinapkan minimal 1x24 jam dulu. Sehingga, pengusaha dikenakan ketentuan harus membayar sewa lahan.

Pedagang daging sapi di Pasar Kranji Baru, Kecamatan Bekasi Barat mogok berjualan mulai Rabu (20/1). Hal ini terjadi karena margin harga jual daging sapi sudah sangat tipis bahkan sampai menjual rugi.

Pantauan *Republika* di Pasar Kranji Baru, Kecamatan Bekasi Barat, deretan kios yang biasanya diisi pedagang daging menjadi tidak berpenghuni. Seorang pemilik kios bernama Rudi (34), mengatakan, aksi mogok berjualan merupakan puncak kekesalan pedagang menyikapi harga jual daging yang naik drastis.

Dia mengatakan, harga daging sapi eceran di RPH naik sejak hari libur Natal 2020. "Dari yang tadinya Rp 110 ribu menjadi Rp 120 ribu," kata Rudi saat ditemui. **R-3**

Kondisi itu semakin diperparah adanya pandemi Covid-19, yang membuat pembeli terus berkurang. "Sebagai pedagang daging yang sudah berjualan sejak 2010, Rudi paham sebenarnya konsumennya dari kalangan menengah atas. Namun, sekarang pembeli sepertinya menahan pengeluaran imbas harga naik dan pandemi Covid-19. "Nah mereka selama korona pada mengurangi beli daging. Bisa dibilang kami itu sudah jatuh tertimpa tangga," katanya berkeluh kesah.

Kondisi berbeda ditemukan di pasar tradisional di Kota Bogor. Di sejumlah pasar yang didatangi *Repub-*

lika, pedagang daging sapi berjualan seperti biasanya. Di Pasar Sukasari, Pasar Bogor, dan Pasar Jambu Dua, harga daging sapi di jual Rp 120 ribu per kg. Sedangkan, di Pasar Gunung Batu daging sapi dibanderol dengan harga Rp 125 ribu per kg.

"Di Jambu Dua masih aman. Tidak ada info ada aksi mogok dagang dari para pedagang seperti yang dilakukan pedagang tahu dan tempe saat awal tahun lalu," ujar Kepala Unit Pasar Jambu Dua, Hilman Hafitaviyani.

Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor Muzakkir juga menegaskan, tidak ada aksi mogok yang dilakukan pedagang daging sapi. "Pedagang masih berjualan, tapi jumlah sapi yang dipotong jadi berkurang. Yang tadinya 30 ekor sehari, sekarang jadi 20 ekor saja," jelas Muzakkir.

■ uji sukma medianti/shabrina zakaria
ed: erik purnama putra

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 8 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Pedagang Daging Mogok Tiga Hari

Harga daging sapi di kisaran Rp 125 ribu per kg mencekik pedagang.

TANGERANG — Ancaman pedagang daging sapi di Jabodetabek yang ingin mogok dibuktikan dengan tidak berjualan mulai Rabu (20/1) hingga Jumat (22/1). Pantauan di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, deretan lapak yang biasanya ramai digunakan pedagang sebagai tempat berjualan daging sapi tampak kosong.

Lapak yang berada di sisi selatan itu bersih dari dagangan berupa daging yang saban hari dijajakan. Seorang pedagang daging sapi di Pasar Ciputat yang mogok berjualan, Suheli (30 tahun) mengaku, sengaja ikut aksi tidak berjualan selama tiga hari seperti pedagang lainnya. **R. S**

Dia menjelaskan, dasar aksi mogok yang dilakukan para pedagang daging sapi di Pasar Ciputat agar pemerintah bisa menurunkan harga jual. Menurut dia, harga daging sapi di pasaran saat ini sudah terlampaui tinggi. "Intinya semua pedagang daging sapi mogok supaya harganya bisa normal lagi," tutur Suheli kepada *Republika*, Rabu (20/1).

Dia menjelaskan, harga daging sapi di rumah pemotongan hewan (RPH) saat ini mencapai Rp 95 per kilogram (kg). Harga itu naik Rp 10 ribu per kg dibandingkan saat normal di angka Rp 85 ribu per kg. Dengan kenaikan itu, Suheli akhirnya menjual kepada pembeli sekitar Rp 120 ribu hingga Rp 125 ribu per kg. Akibat kenaikan tersebut, penjualan daging di pasar otomatis menurun karena per-

mintaan menjadi lesu.

Suheli menyebut, kenaikan harga daging sapi saat ini, cukup mencekik pedagang. "Sebelum kenaikan itu bisa terjual 50 kilogram, bahkan bisa habis satu kuintal. Sekarang paling (maksimal) 40 kilogram," ujarnya.

Dengan adanya penurunan penjualan, Suheli mengaku, pendapatannya juga merosot dari sebelumnya sebanyak Rp 20 juta per hari menjadi sekitar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per hari.

Di deretan lapak pedagang daging, *Republika* hanya mendapati Muhammad Yusuf (45), seorang diri yang berada di lapaknya. Pedagang daging sapi impor itu tersebut mengaku sedang menongkrong di sekitar pasar saja, bukan mau berjualan.

"Saya *ngikut* orang-orang. Kata orang-orang libur ya libur, kompak. Soalnya (harga) daging ini *enggak* berhenti-berhenti naiknya, sedangkan penjualan di pasar itu masih lerah," cerita Yusuf.

Dia menuturkan, sengaja tidak bisa menjual daging sapi lokal karena tak kuat dengan harganya yang melambung tinggi. Dengan harga di atas Rp 120 ribu, sambung dia, pembeli pasti menurun. "Bisa belanja (daging lokal), tapi *enggak* bisa setor. Masalahnya harganya. Kalau Rp 130 ribu per potong kayaknya kewalahan," terang Yusuf.

Dia mengakui, harga daging sapi impor yang dijual di pasaran juga mengalami kenaikan. Namun, kenaikan-

nya masih cukup terjangkau konsumen. Dia menuturkan, harga daging sapi impor dari sebelumnya Rp 70 ribu per kg menjadi Rp 73 ribu per kg dari pemasok. Dia pun menjual ke pembeli dengan harga Rp 190 ribu hingga Rp 105 ribu per kg.

Menurut Yusuf, pendapatan yang

diterimanya terbilang relatif stabil, yaitu di angka Rp 6 juta per hari. Meski begitu, ia memilih menunjukkan rasa solidaritas dengan pedagang daging lainnya demi mencapai tujuan bersama. "Sekarang *mah enggak mikirin* untung, yang penting pertahankan langganan *doang*," kata Yusuf menjelaskan misi mogok.

Desak pemerintah

Puluhan pedagang daging sapi di PD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, juga melakukan hal serupa. Mereka ikut aksi dengan tujuan mendesak pemerintah menekan harga daging sapi yang melonjak. Sejumlah lapak pedagang daging sapi di PD Pasar Minggu, kosong, dan hanya terlihat penjual daging kambing.

Seorang pedagang daging sapi di PD Pasar Minggu, Rojali menjelaskan, keputusan tidak berjualan menyikapi harga daging yang berkisar Rp 120 ribu hingga Rp 130 ribu per kg. "Pembeli merasa keletaran dan *ngeluh*. Apalagi tukang bakso. Sedangkan, yang banyak beli itu ya tukang bakso atau nasi padang," kata Rojali di depan lapak dagangnya di Blok C Lantai Dasar PD Pasar Minggu.

Rojali menjelaskan, kenaikan harga daging secara perlahan dalam dua pekan terakhir. Harga daging yang

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

| | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input checked="" type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 8 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

biasanya Rp 110 ribu per kg, naik menjadi Rp 120 ribu hingga 130 ribu per kg. "Sebelum naik saya bisa jual 100 kg daging per hari. Sejak naik jadi Rp 130 ribu, saya cuma bisa jual 50-60 kg saja," kata Rojali.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI telah mengantisipasi langkah pedagang daging sapi yang tidak berjualan selama tiga hari. "Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka alternatif penyediaan daging sapi beku" kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas KPKP DKI, Suharini Eliawati. ■ eva rianti/febryan/flori sidebang ed: erik purnama putra

Harga Tinggi, Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan

JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengatakan, pedagang daging sapi di pasar mulai mogok berjualan sejak Selasa (19/1) malam. Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansari mengatakan, mogok ini bagian dari protes kepada pemerintah supaya lebih aktif berkomunikasi dengan pedagang untuk menyelesaikan persolan melonjaknya harga daging sapi.

Menurut dia, harga daging sapi yang awalnya sebesar Rp 90 ribu sampai Rp 100 ribu per kilogram, kini melonjak menjadi sekitar Rp 120 ribu sampai Rp 150 ribu per kilogram. "Itu yang membuat kami tidak bisa menjual. Sedangkan daya beli terus turun. Kalau kami sudah

berusaha menjual tapi tidak laku atau rugi *kan* tidak mungkin. Kalau sehari dua hari tidak apa-apa, kalau berminggu-minggu *kan* tidak mungkin," kata Abdullah kepada *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (19/1).

Ketua Harian Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengaku, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk menstabilkan kembali harga daging sapi. Asnawi mengatakan, harga meningkat karena importir sapi telah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari negara produsen seperti Australia.

Menurut dia, per Juli 2020, harga

sudah berada pada posisi US\$ 3,6 per kilogram hidup sapi bakalan, dan harga per bulan Januari-Februari 2021 menjadi US\$ 3,9 per kilogram bobot hidup sapi bakalan. "Kenaikan harga terjadi sejak Juli 2020 sampai dengan Januari 2021 sudah mencapai Rp 13.000 per kilogram pembelian sapi bakalan dari Australia," kata Asnawi.

Di tambah biaya untuk bongkar muat pelabuhan dan pengangkutan, tambah Asnawi, harga daging sapi menjadi semakin tinggi. Untuk mengatasi kenaikan harga itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, menurut dia, telah meminta Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) untuk sementara waktu tidak menaikkan harga tim-

bang hidup sapi di tempat pemberian pakan atau *feedlot* dalam jangka waktu dua bulan ke depan.

"Untuk jangka dua bulan ke depan tidak ada kenaikan harga lagi timbang hidup sapi di *feedlot*. Yaitu dengan harga Rp 47.000-48.500 tertinggi, setara dengan harga karkas Rp 95.000-98.000 per kg tertinggi," ucap Asnawi.

Dia mengungkapkan, Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat akan memberi izin impor sapi dari Meksiko dan sapi slaughter Australia. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri juga akan segera mengumumkan bahwa harga jual daging sapi di tingkat pengecer atau pedagang daging yang saat ini menyentuh Rp 130 ribu per kilogram merupakan anomali. (sny)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

| | | | | |
|---|--|---|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input checked="" type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL | 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN | 6 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI | <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Harga Daging Tinggi, Izin Impor Menanti

JAKARTA - Gonjang-ganjing harga komoditas pertanian kembali terjadi. Setelah persoalan kedelai meredup, kini muncul masalah daging. Tingginya harga daging jadi pemicunya.

Para pedagang daging sapi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) mogok jualan selama tiga hari. Mereka tak jualan mulai Rabu (20/1) kemarin hingga Jumat (22/1) besok.

Aksi mogok ini dilakukan sebagai bentuk protes atas melonjaknya harga daging sapi di rumah pemotongan hewan (RPH). Harga per kilogram daging sapi yang belum dipisah antara tulang dan kulitnya adalah Rp95.000/kg. Harga tersebut dinilai terlalu tinggi untuk dijual kembali ke pasar.

Pasalnya pedagang masih menanggung biaya ekspedisi dan upah karyawan yang totalnya bisa mencapai Rp120.000/kg. Adapun harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp120.000/kg.

Bagi pedagang, kenaikan harga daging sapi ini justru merugikan mereka. Pasalnya kenaikan harga itu mengakibatkan masyarakat enggan membeli daging sapi. Apalagi saat ini daya beli masyarakat juga turun sebagai dampak terjadinya Covid-19.

Lonjakan harga daging ini sejatinya sudah dirasakan sejak empat bulan terakhir. Kenaikan harga itu diprediksi akan terus terjadi hingga April 2021. "Diprediksi akan naik terus sampai dengan bulan Maret atau April dengan harga tertinggi Rp105.000/kg per karas. Sekarang itu harga per karkas masih

Rp94.000/kg," kata Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta Tb Mufti Bangkit kemarin.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 20 Januari 2021, harga daging sapi untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp129.150/kg dan di Jawa Barat Rp124.950/kg.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengatakan, penyebab tingginya harga sapi karena kenaikan yang memang sudah terjadi pada negara produsen. "Pihak importir sapi mendapatkan harga yang sudah sangat tinggi dari negara produsen seperti Australia," ujar Asnawi.

Menurut Asnawi, kenaikan harga sapi bakalan hidup dari Australia sudah terjadi sejak Juli 2020 yang hingga Januari 2021 kenaikan harga sudah mencapai Rp13.000/kg. Ia menjelaskan, pada Juli 2020, harga sapi bakalan hidup dari Australia sudah di level USD3,6/kg.

Harga itu berlanjut naik hingga per Januari-Februari 2021 di level USD3,9/kg untuk sapi bakalan hidup. "Belum biaya-biaya bongkar muat pelabuhan dan transportasi angkutan," imbuh Asnawi.

Kondisi tersebut tentunya berdam-

pak pada kenaikan harga daging sapi di dalam negeri mengingat pasokan sapi Indonesia sebagian berasal dari impor.

Menyikapi melambungnya harga daging tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra memanggil pengurus APDI dan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Selasa (19/1).

Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal terkait harga daging sapi. Di antaranya Kemendag menaikkan HET daging sapi di tingkat pengecer dari semula Rp120.000/kg menjadi Rp130.000/kg. "Pemerintah segera memberikan pengumuman terkait kenaikan yang bersifat anomali, bahwa harga jual daging sapi di tingkat pengecer/pedagang daging Rp130.000/kg," ungkap Asnawi.

Stabilisasi harga dilakukan dengan mengutamakan dahulu ketersediaan pasokan daging sapi kepada masyarakat serta hanya menjaga harga daging stabil untuk periode jangka pendek walaupun dengan level harga lebih tinggi dari periode sebelumnya.

Pada pertemuan itu, kata Asnawi, Kemendag juga meminta Gapuspindo untuk sementara waktu atau dalam jangka dua bulan ke depan tidak menaikkan harga timbangan hidup sapi di

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input checked="" type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 6/1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

feedlot. "Yaitu dengan harga Rp47.000-48.500 tertinggi, setara dengan harga karkas Rp95.000-98.000/kg tertinggi," ujarnya.

Selain itu dalam upaya stabilisasi harga dan kecukupan ketersediaan sapi siap potong, disepakati Kemendag dalam waktu dekat akan memberikan izin kepada importir untuk melakukan impor sapi dari Meksiko dan Australia.

Terkait aksi mogok yang dilakukan pedagang daging sapi, katanya, Kemendag membebaskan keputusan tersebut kepada pedagang. Sebab pemerintah tak bisa memaksakan pedagang berjualan dengan menanggung kerugian.

Meski demikian, lanjut Asnawi, jika Kemendag telah mengumumkan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi tersebut ke publik, pedagang daging sapi akan mulai kembali berjualan. "Ketika pemerintah melalui Ditjen Perdagangan Dalam Negeri telah mengumumkan hasil kesepakatan ke publik, pedagang diminta untuk kembali berdagang," imbuh Asnawi.

Sementara itu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku siap berdialog dengan asosiasi pedagang daging sapi. "Kalau mereka datang pasti kami terima. KSP akan selalu menerima berbagai aspirasi itu dan yang paling penting adalah kita carikan solusinya," kata dia di kantornya kemarin.

Sebagaimana sebelumnya, harga kedelai mengalami lonjakan sehingga menurut Moeldoko perlu dilakukan langkah-langkah cepat. Dia mengakui memang harga daging sapi saat ini sudah cukup tinggi.

"Seperti kemarin persoalan kedelai juga seperti itu. Harus ada langkah-langkah cepat di lapangan. Tapi memang harga daging ini cukup tinggi ya harganya. Saya sudah dengar harganya antara Rp130.000-an ya," ungkapnya.

ferdiranting/dita.anggarusiana

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 14 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Panen Terganggu Banjir

Bisnis, JAKARTA — Produksi minyak sawit di Malaysia menghadapi pukulan ganda dari kekurangan pekerja dan banjir di wilayah-wilayah utama pemasok terbesar kedua di dunia itu.

Hujan lebat telah menyebabkan banjir bandang di beberapa bagian Sabah, Sarawak, Johor, Pahang, dan Perak, negara bagian penghasil minyak sawit terbesar di negara itu.

Meskipun pohon kelapa sawit biasanya menyukai air dan tahan terhadap cuaca basah, banjir yang berkepanjangan dapat mengusik panen, menyebabkan buah menjadi terlalu matang, dan kualitas minyak memburuk. Pengangkutan tandan buah segar (TBS) ke pabrik pun terganggu.

Masalah itu diperparah dengan penerapan kembali pembatasan di Malaysia mu-

lai 13 Januari yang mungkin berlangsung hingga Agustus. Pembatasan itu memperumit perekrutan tenaga kerja asing yang sangat dibutuhkan oleh industri kelapa sawit.

"Kehilangan hasil panen tidak dapat dihindari karena banyak bagian ladang terendam di bawah air selama dua hingga tiga pekan," kata Direktur Eksekutif United Plantations Bhd., Carl Bek-Nielsen, dilansir *Bloomberg*, Rabu (20/1).

CEO Asosiasi Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Sarawak Andrew Cheng mengatakan kekurangan pekerja yang akut menambah masalah produksi yang disebabkan oleh banjir.

"Saya yakin banyak perkebunan kelapa sawit di daerah dataran rendah Sarawak akan terpengaruh, terutama dengan masuknya King Tide," kata Cheng, mengacu pada air

pasang yang sangat tinggi.

Sime Darby Plantation Bhd., penanam kelapa sawit terbesar di dunia berdasarkan luas area, mengatakan sekitar 3% dari operasi hulu terkena dampak banjir dan penutupan jalan.

Bek-Nielsen mengatakan kekurangan pekerja minyak sawit Malaysia jauh lebih buruk dibandingkan dengan enam bulan lalu. Kendala itu menyumbang hingga 90% dari 3,6 juta ton TBS yang hilang tahun lalu.

Sementara produksi kuartal I/2021 tidak akan jauh lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Dampak dari kekurangan tenaga kerja yang akut akan benar-benar dirasakan pada produksi April hingga Oktober, menyebabkan penurunan produksi menjadi 18,6 juta ton. (Reni Lestari) 21/1

Dana Peremajaan Sawit Rakyat Siap

JAKARTA. Pemerintah memastikan anggaran peremajaan kebun sawit rakyat tahun ini bisa dipenuhi. Dana tersebut disiapkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

BPDPKS sendiri mendapatkan dana dari pungutan ekspor komoditas sawit. "Berapa pun yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan), kami memastikan BPDPKS mampu memenuhi," ujar Andin Hadiyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Rabu (20/1).

Sebagai informasi, target peremajaan kebun sawit rakyat pada tahun 2021 mencapai 180.000 hektare (ha). Dengan besaran bantuan sebesar Rp 30 juta per ha, dana yang diperlukan pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp 5,4 triliun.

"Total yang dibutuhkan dana pada tahun 2021 sebesar Rp 5,4 triliun sudah disiapkan agar pelaksanaan program ini bisa berjalan dengan baik," kata Eddy Abdurrahman, Direktur Utama BPDPKS.

Abdul Basith Bardan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 7 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

BPDPKS Salurkan Rp 5,32 Triliun untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Oleh **Tri Listiyarini**

► JAKARTA—Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan dana sebesar Rp 5,32 triliun untuk pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada periode 2016-2020. Dengan dana tersebut, total luasan kebun sawit petani yang diremajakan mencapai 200.205 hektare (ha) yang dimiliki 87.906 pekebun.

Tahun ini, BPDPKS telah menyiapkan anggaran Rp 5,40 triliun untuk mendanai target PSR seluas 180 ribu ha atau dengan alokasi Rp 30 juta per ha kebun sawit petani.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman mengatakan, khusus 2020, dana yang disalurkan BPDPKS untuk PSR sebesar Rp 2,67 triliun dengan realisasi lahan 94.033 ha. BPDPKS menyalurkan dana berdasarkan rekomendasi teknis (rekomtek) yang dikeluarkan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) yakni sebesar Rp 30 juta per petani dan maksimal luasan yang bisa dibiayai 4 ha per kepala keluarga (KK) petani. "Pemerintah menargetkan 180 ribu ha untuk tahun ini, dana yang diperlukan Rp 5,40 triliun, kami siapkan agar program PSR berjalan dengan baik. BPDPKS juga memberikan dukungan dana lainnya untuk operasional Ditjen Perkebunan dan Dinas Perkebunan di daerah dalam rangka penerbitan rekomtek," kata dia saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan

Komisi IV DPR, Rabu (20/1).

Eddy menuturkan, BPDPKS berdiri pada 2015 dan program PSR dimulai sejak 2016. Meski realisasi PSR masih jauh dari target pemerintah seluas 500 ribu ha, perkembangan pelaksanaan PSR sejatinya sudah cukup baik. Pada 2016, realisasi PSR hanya 254 ha, namun pada 2017 naik menjadi 2.932 ha, pada 2018 seluas 12.524 ha, pada 2019 seluas 90.642 ha, dan pada 2020 seluas 94.033 ha. "Jika dibandingkan target yang diminta Bapak Presiden agar tiga tahun dilakukan PSR seluas 500 ribu ha atau 180 ribu ha tiap tahunnya, capaian PSR memang masih kurang, baru sekitar 51%. Tapi kalau kita lihat perkembangannya cukup bagus, bahkan pada 2019 naik signifikan, kami apresiasi semua pihak. Harapannya, dengan terobosan yang sudah disiapkan Ditjen Perkebunan maka program ini bisa lebih cepat lagi," jelas dia.

Sumber dana untuk program PSR yang disalurkan BPDPKS tersebut berasal dari pungutan ekspor (PE). BPDPKS menargetkan penghimpunan dana PE sawit tahun ini sebesar Rp 45 triliun. Hal



Eddy Abdurrahman

itu seiring pemberlakuan tarif baru PE sawit per 10 Desember 2020 yang tertuang dalam PMK No 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas PMK No 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan. Proyeksi dana itu dapat dicapai dengan perhitungan harga minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) tetap di level tertinggi pada 2021 yakni US\$ 870,77 per ton berdasarkan harga referensi CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Apabila harga CPO sepanjang tahun ini di level moderat maka PE sawit yang bisa dihimpun BPDPKS hanya Rp 36 triliun.

Di tempat yang sama, Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, dari total luas tutupan sawit yang mencapai 16,38 juta ha, yang dikelola petani mencapai 6,72 juta ha. Dari 6,72 juta ha tersebut, terdapat 2,78 juta ha milik petani swadaya yang mendesak untuk diremajakan karena usianya sudah di atas 25 tahun sehingga berpengaruh ke produktivitas tanaman. Karena itulah, program PSR diadakan, harapannya rata-rata produktivitas

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/11/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 7 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

sawit nasional yang hanya 3,60 ton CPO per ha per tahun bisa meningkat menjadi 5-6 ton CPO per ha per tahun seperti klon-klon tanaman sawit yang dihasilkan lembaga riset. "Jadi, pemerintah punya target program PSR 500 ribu ha pada 2020-2022 atau 180 ribu ha per tahun, tahun ini ditargetkan 180 ribu ha kebun sawit petani bisa dijangkau program PSR," kata Kasdi.

Kasdi menjelaskan, pemerintah berusaha membuat program PSR tahun ini berjalan lebih kencang melalui sejumlah terobosan yang telah dan siap dijalankan. Pada 2017-2018, program PSR mengharuskan pekebun memenuhi 14 persyaratan untuk bisa lolos, namun mulai 2019 tinggal delapan persyaratan, dan pada 2020 tersisa dua persyaratan saja untuk memenuhi program PSR, yakni kelembagaan pekebun dan legalitas lahan. "Jadi mulai 2020 dan seterusnya hanya dua syarat saja. Yang lain memang tidak menjadi syarat tapi kami akan coba lengkapi, seperti STDB (surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya), kalau punya ini maka harga sawit petani bisa dibayar lebih tinggi karena *traceability*-nya jelas," ungkap Kasdi.

Terobosan lainnya, kata Kasdi, pemerintah melakukan simplifikasi atau penyederhanaan proses verifikasi. Pada 2017-2019, verifikasi administrasi dilakukan sebanyak tiga kali, yakni di kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Mulai 2020, verifikasi cukup dilakukan sekali melalui modifikasi tim verifikasi dengan mengintegrasikan tim dari pusat, provinsi, dan daerah. Bahkan, mulai 2020 dan seterusnya BPDPKS juga membuat terobosan dengan merekrut tim surveyor

independen untuk mempercepat proses awal pengurusan administrasi PSR di lapangan. "Jadi, melalui dua jalur, yakni Ditjen Perkebunan Kementan dan surveyor ini maka proses administrasi pengurusan PSR bisa berjalan cepat. Untuk kegiatan oleh surveyor ujungnya tetap di kami untuk sampai pada penerbitan rekomtek," jelas Kasdi.

Stabilitas Harga

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, PSR memiliki tiga tujuan yakni peningkatan produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS) sawit, peningkatan praktik perkebunan yang baik, dan perbaikan tata ruang perkebunan sawit Indonesia. Dalam empat tahun ini, target Komite Pengarah BPDPKS memang cukup ambisius mengingat potensi lahan sawit yang harus diremajakan mencapai 2,78 juta ha. "Dan berapapun yang dicapai Ditjen Perkebunan Kementan, kita pastikan BPDPKS mampu membayarnya. Misalnya, tahun 2020 targetnya 180 ribu ha dan tercapai 94 ribu ha, tapi anggaran untuk 180 ribu ha sudah disiapkan saat itu. Kami sangat apresiasi terjadi kenaikan PSR sangat signifikan dari tadinya hanya 20 ribu ha menjadi 94 ribu ha dan mudah-mudahan target 180 ribu ha per tahun bisa diupayakan dan BPDPKS sudah menyediakan dananya," kata dia.

Tantangan di industri sawit selain produktivitas adalah permintaan (*demand*). Salah satu peran BPDPKS adalah membantu meningkatkan permintaan melalui mandatori biodiesel agar harga sawit dalam hal ini CPO tetap terjaga, artinya kesejahteraan petani

tetap baik dan industri hilir tetap berjalan mengingat saat ini sawit Indonesia mempunyai 150 produk turunan yang apabila harga bahan bakunya mahal maka industrinya bisa terganggu. "Harga CPO yang terlalu tinggi juga tidak bagus karena sawit Indonesia memiliki lebih 150 produk turunan. Kalau industri turunan ini terganggu nanti kesejahteraan petani juga bisa turun. Di sinilah peran BPDPKS untuk menjaga stabilitas harga sawit supaya terjaga, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Harga jangan sampai *overshooting* nanti banyak spekulasi," ujar Andin.

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input checked="" type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL | 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN | 3 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI | <input type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | | <input checked="" type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Ketika Jokowi Marah Di Rapat Soal Pertanian (1)



Oleh: Prof. Tjipta Lesmana

SEKITAR 2,5 tahun yang lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah melontarkan wacana pencabutan subsidi pupuk. Alasannya, subsidi pupuk tiap tahun makin meningkat, memberatkan beban anggaran pemerintah. Tidak jelas bagaimana efektivitas subsidi tersebut.

Lebih baik, subsidi pupuk dicabut saja. Anggarannya diberikan langsung kepada petani. Biar petani sendiri yang bebas menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah untuk kebutuhan pupuknya. Selesai. Pemerintah tidak pusing menangani urusan ini.

Berbeda dengan subsidi BBM yang tempo hari juga menjadi masalah kontroversi karena angkanya yang terus meningkat, masalah subsidi pupuk memberikan kesan hanya pabrik pupuk yang menikmati subsidi tersebut.

Wacana subsidi pupuk kembali dilempar oleh Presiden Jokowi dua pekan lalu, ketika Presiden membuka Rapat Kerja Kementerian Pertanian. Jokowi pagi itu tampak kesal. Hal ini

terlihat dari ekspresi wajahnya. Setelah paparan Menteri Pertanian yang terkesan membanggakan kinerja instansinya dengan angka-angka ekspor dan kontribusi sektor Pertanian pada PDB di tengah situasi pandemi Covid-19 yang ditandai *jeblok*-nya kinerja hampir semua Kementerian, giliran Presiden yang pidato.

Berbeda dengan pidato Presiden yang lalu-lalu, kali ini Jokowi *straight to the point*. Tanpa basi-basi, ia langsung "menghantam" kinerja Kementerian Pertanian.

Entah dari mana sumber datanya, Jokowi mengecilkan arti ekspor-ekspor Kementan selama era pandemi Corona. Ia menuding, ekspor Kementan, sebagian besar karena kontribusi ekspor kelapa sawit.

Tapi bagaimana dengan kedelai yang impornya terus meningkat? Kenapa petani kita enggak mau menanam biji kedelai.

Bagaimana dengan bawang putih, jagung, gula dan..... Kenapa impor terus meningkat? Ibarat senapan mesin ringan LMG buatan (awalnya) Inggris yang dapat memuntahkan sekian banyak peluru dalam tempo 30 detik, Jokowi memuntahkan kata-katanya begitu cepat dengan nada yang kesal dan wajah muram.

Masih tidak puas dengan "LMG" bermuatan bawang putih, kedelai dan gula, Jokowi kemudian "menggugat" soal pupuk bersubsidi. "Bagaimana dengan pupuk bersubsidi? Berapa tiap tahunnya", ia palingkan wajah-

nya ke Sri Mulyani yang duduk di baris depan, sebelah kanan Presiden, seolah bertanya pada Menteri Keuangan.

Sri Mulyani seperti menyebut angka Rp 33 triliun. "Tiga puluh tiga triliun per tahun! Berapa 10 tahun? Tiga ratus tiga puluh tiga triliun!! Bagaimana itu?"

Jokowi seperti menggugat pabrik pupuk dan Kementan: Kenapa begitu besar subsidi pupuk? Sampai kapan?

Mendengar "gugatan" Presiden, Penulis jadi ingat kembali wacana yang dilempar Jusuf Kalla 2,5 tahun yang lalu: hapus saja subsidi pupuk.

Pertanyaan kita: sejauh mana kebenaran "gugatan" Presiden tentang pupuk bersubsidi? Benarkah hanya memberatkan beban anggaran pemerintah? Jika subsidi pupuk diberikan langsung kepada petani, apa masalahnya selesai? Atau bukan sebaliknya, sektor pertanian kita bakal babak-belur dan ketahanan pangan kita terancam bahaya?

Para pembantu Presiden yang menyusun pidato Presiden hari itu, tampaknya, kurang cermat, terutama menyangkut pupuk bersubsidi. Logikanya amat sederhana: Jika subsidi pupuk dicabut dan diberikan langsung kepada para petani, apa persoalan selesai? Kenapa setelah dua tahun lebih berwacana, pemerintah masih tidak berani melaksanakannya?

Pemerintah (c/q Kementerian Pertanian) tiap tahun menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi. Penetapan HET harus dilaporkan kepada Komisi IV DPR.

Bukan hanya ditaporkan, tapi juga mendapat persetujuan DPR dalam forum RDP, Rapat Dengar Pendapat antara DPR dan pemerintah.

Harga pupuk di lapangan tidak boleh melebihi HET yang telah ditetapkan tersebut. Misalnya, HET urea Rp 1800/kg, NPK Rp 2300/kg, organik Rp 500/kg. Subsidi yang diberikan pemerintah selama ini untuk menutup selisih biaya produksi dengan Harga Eceran Tertinggi. Tujuannya, agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau.

Cara pembayaran subsidi dilakukan dengan sistem *reimburse*: produsen pupuk menalangi dulu biaya produksi dan distribusi sampai ke gudang di kabupaten (istilahnya, ke lini 3) setelah didistribusikan. Biaya yang timbul itu (subsidi) oleh pabrik pupuk, kemudian ditagihkan kepada Pemerintah (Kementerian Keuangan) dengan melampirkan bukti-bukti yang sah.

Proses ini, dari penetapan HET, produksi, subsidi dan distribusi diawasi/di-audit sangat ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena pabrik harus mengeluarkan dana dulu untuk menutup

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input checked="" type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input checked="" type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

subsidi, maka mereka terpaksa minta kredit bank. Bunga kredit mau tidak mau dibebankan pada biaya produksi pupuk.

Soal pupuk bersubsidi memang cukup kompleks. Banyak orang yang kurang paham, lalu caci-maki ke pemerintah dan/atau pabrik subsidi.

Menurut hasil survei terakhir BPS, jumlah petani Indonesia sekitar 22,4 juta orang. Tapi petani yang terdaftar dalam RDKK (Electronic Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 16,7 juta petani, sehingga ada 5,6 juta petani yang tidak mendaftar.

Mereka yang tidak terdaftar dalam RDKK tentu tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Harga pupuk tidak bersubsidi hampir 2 x lipat dari harga pupuk bersubsidi. Banyak faktor, kenapa sebagian petani tidak mau mendaftar dalam RDKK, antara lain karena kurang *care*, tidak tahu, kurang paham prosedurnya, dll. ■ BERSAMBUNG

2



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input checked="" type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input checked="" type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input checked="" type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

(2/Selesai)

Ketika Jokowi Marah Soal Pupuk



Prof. Tjipta Lesmana
Mantan Anggota Kelompok Kerja
Ketahanan Nasional Lemhannas

Kebutuhan pupuk (semua jenis pupuk) petani sebetulnya 23 juta ton. Namun kemampuan produksi pabrik-pabrik pupuk kita, hanya 15 juta ton. Jadi, Indonesia akan terus mengalami kelangkaan pupuk.

Rencana Presiden Jokowi untuk membangun *food-estate* dengan luas lahan ratusan ribu -- bahkan sampai jutaan hektar -- dalam rangka menekan harga produk pertanian, tak semudah wacana. Darimana kebutuhan pupuknya? Sedang pabrik pupuk dalam negeri saat ini saja tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk.

Kenapa tidak impor saja untuk menutupi kelangkaan pupuk?

Tanya pengusaha kita yang "import minded". Jika keran impor pupuk dibuka lebar-lebar, terutama dari China, pupuk dalam negeri bisa terancam gulung tikar. Kenapa? Harga pupuk China jauh lebih murah, karena harga gas di China sangat murah dibanding harga gas di Indonesia. *Km.3*

Kenapa murah? Karena pemerintah RRC pintar. Jika bikin kontrak beli gas dengan negara lain, RRC minta kontrak jangka panjang, sehingga selama masa kontrak, harga gas tidak berubah. Bukankah tempo hari gas Indonesia dari Papua diikat kontrak China dengan masa kontrak puluhan tahun dan harga yang murah?

Komoditas *made-in China*, hampir semua, memang murah harganya. Maka, daya saing perdagangan RRC sangat tinggi. Pemerintah Donald Trump tidak berdaya membendung impor komoditas dari China. Tak heran, pertumbuhan ekonomi RRC pada 2020 bisa mencapai 2,7%, lebih tinggi dari prediksi IMF sebesar 1,9%, sementara di banyak negara terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Jika pupuk luar membanjiri Indonesia, sektor pertanian bisa terancam. Ketahanan pangan Indonesia juga bisa goyah!

Memang harus diakui bahwa kemampuan subsidi pupuk oleh negara terbatas. Kesenjangan (*gap*) antara kemampuan subsidi oleh negara dengan usulan kebutuhan yang tercantum dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sangat besar. Untuk 2021, misalnya, rekap RDKK mencapai sekitar 23 juta ton; sedang kemampuan subsidi pemerintah hanya 7,2 juta ton.

Pemerintah akhirnya menyetujui penambahan alokasi subsidi pupuk menjadi 9 juta ton setelah dilakukan rasionalisasi HPP (Harga Pokok Produksi) yang diperoleh dari penurunan harga gas, efisiensi biaya produksi, dll.

Anggaran Pemerintah untuk subsidi pupuk sebetulnya fluktuatif. Dari data yang kami peroleh, tahun lalu misalnya, alokasi pupuk subsidi mengalami penurunan 924.697 ton. Beberapa daerah memang telah mengajukan penambahan kuota volume pupuk bersubsidi, karena terjadi kekurangan pupuk bersubsidi.

Soal efektivitas subsidi pupuk, tampaknya sangat naif jika ada yang meragukannya. Produktivitas beberapa sub sektor pertanian beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan.

Adanya surplus beras di akhir

tahun lalu dan tidak adanya impor beras beberapa tahun terakhir, merupakan sumbangan aplikasi dosis pemupukan yang tepat oleh petani, karena pembelian pupuknya disubsidi Pemerintah. Penggunaan pupuk bersubsidi pada 2018 memang tercatat sangat tinggi, namun produktivitas sektor pertanian kita juga tercatat paling tinggi pada 2018.

Kesimpulan kita, masalah pupuk bersubsidi memang agak ribet. Banyak faktor yang ikut menentukan. Pemerintah harus duduk dan dialog dengan semua pemangku kepentingan, untuk mengupayakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk dan maksimalisasi produksi pupuk dalam negeri. Pemerintah harus bantu pabrikan dalam hal ini, terutama pada pengadaan gas.

Harga gas sebesar US\$ 6 per mmbtu masih tinggi dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei; apalagi dengan RRC. Padahal 70% biaya produksi pupuk terdiri atas biaya gas. Yang juga aneh, harga gas untuk pabrik pupuk PIM (Pupuk Iskandar Muda, Aceh) jauh lebih tinggi. Alasannya, karena didatangkan dari gas yang berlokasi lebih jauh.

Wacana menggantikan pupuk

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input checked="" type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 5 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input checked="" type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

bersubsidi dengan pemberian subsidi langsung kepada petani perlu dikaji secara seksama dan hati-hati. Pemberian subsidi langsung kepada petani berarti memberlakukan prinsip *free fight economy* terhadap komoditas yang begitu strategis dan menyentuh Ketahanan Pangan.

Apa ada jaminan bahwa petani akan membelanjakan subsidi yang diperoleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pupuk mereka dengan membeli pupuk yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan selalu tersedia pupuk yang dibutuhkan? Bisa saja terjadi uang yang diterima dari pemerintah dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga atau keperluan sempit lainnya.

Kecuali itu, prinsip persaingan bebas selalu membuka pintu korupsi dan penyelundupan. Akan terjadi kepincangan harga pupuk antara satu daerah dengan daerah lain, karena harga pupuk dipengaruhi oleh ongkos transportasi. Harga pupuk di Indonesia bagian Timur kemungkinan lebih mahal dari harga pupuk di Pulau Jawa.

Ujung-ujungnya, ketahanan pangan negara kita akan goyah, bahkan bisa didekte oleh negara-negara produsen pupuk yang menguasai Indonesia! ■